

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM
PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA PIDANA YANG MENGGUNAKAN
ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH**

(Studi di Kejaksaan Negeri Padang)

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

CHINDY DWI KHAIRATUL IKHSAN

2210113073

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.

Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

No. Reg : 27/PK-IV/I/2026

	No. Alumni Universitas	Chindy Dwi Khairatul Ihsan	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Batam/ 15 Maret 2004 b. Nama Orang tua : Ardison c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2210113073	f. Tanggal Lulus : 29 Januari 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 5 Bulan i. IPK : 3,92 j. Alamat : Bengkong Kolan, Kota Batam	
IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG) <i>Chindy Dwi Khairatul Ihsan, 2210113073, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Khusus Hukum Pidana (PK IV), 74 Halaman, 2026</i> ABSTRAK Penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dalam proses peradilan pidana menunjukkan bahwa implementasi asas praduga tidak bersalah masih menghadapi persoalan serius dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kondisi ini menjadi persoalan penting ketika jaksa sebagai <i>dominus litis</i> tetap melanjutkan penuntutan tanpa verifikasi terhadap legalitas alat bukti, sehingga berpotensi melanggar asas hak asasi manusia dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah dalam penuntutan terhadap perkara pidana yang menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah di Kejaksaan negeri padang? dan Kedua, bagaimana pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara yang menggunakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum serta kendala yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Padang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris di Kejaksaan Negeri Padang. Sifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan menganalisis yang bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa dalam penanganan perkara pidana tetap berdasarkan pada asas praduga tidak bersalah, hanya saja dalam beberapa praktik penggunaan asas tersebut sering kali dikesampingkan. Bahkan, saat jaksa dihadapkan dengan situasi yang mengindikasikan adanya alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, jaksa memilih untuk tetap melanjutkan penuntutan sepanjang telah memenuhi minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 183 KUHP dan alat bukti tersebut mendukung pembuktian unsur tindak pidana. Selain itu, kendala utama yang dihadapi jaksa meliputi kurangnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, rendahnya profesionalitas dalam menilai legalitas alat bukti, keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung, serta keterbatasan kewenangan jaksa dalam menguji proses penyidikan karena pengujian keabsahan alat bukti sepenuhnya dilakukan oleh hakim di persidangan. Adapun saran yang diberikan Jaksa perlu meningkatkan profesionalitas bekerja, diperlukan aturan mengenai pedoman koordinasi antar penyidik. Kata Kunci : Asas Praduga Tidak Bersalah, Penuntutan, Sistem Pembuktian, Alat Bukti Tidak Sah			

Sketsa ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 29 Januari 2026

Penguji,		
Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM	Efren Nova, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



Alumni University Number	Chindy Dwi Khaeratul Ikhsan	Alumni University Number
--------------------------	-----------------------------	--------------------------

a. Place/Date of Birth : Batam /15th March 2004
 b. Parent's Name : Ardinon
 c. Faculty : Law
 d. Concentration : Criminal Law
 e. Student ID : 2210113073

f. Graduation Date : 29th January 2026
 g. Pass Predicate : Cumlaude
 h. Length of Study : 3 years 5 months
 i. GPA : 3,92
 Address : Bengkong Kolam, Kota Batam

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE IN THE PROSECUTION OF CRIMINAL CASES USING ILLEGALLY OBTAINED EVIDENCE (STUDY AT THE PADANG DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE)

(Chindy Dwi Khaeratul Ikhsan, 2210113073, Faculty of Law, Criminal Law, Andalas University, 74 pages, 2026)

ABSTRACT

The use of illegally obtained evidence in criminal justice proceedings shows that the implementation of the principle of presumption of innocence still faces serious problems in law enforcement practices in Indonesia. This condition becomes an important issue when the prosecutor as *dominus litis* continues the prosecution without verifying the legality of the evidence, so that it has the potential to violate the principles of human rights and the rights of the defendant in the criminal justice process. The formulation of the problem discussed in this study is First, how is the implementation of the principle of presumption of innocence in the prosecution of criminal cases that use evidence obtained illegally at the Padang District Attorney's Office? and Second, what is the consideration of the Prosecutor in prosecuting cases that use illegally obtained evidence and the obstacles faced at the Padang District Attorney's Office? This study uses an empirical juridical method at the Padang District Attorney's Office. The nature of analytical descriptive research is explanatory and analytical research that aims to obtain a complete picture of the applicable law. The results of this study show that prosecutors in handling criminal cases are still based on the principle of presumption of innocence, but in some practices the use of this principle is often ignored. In fact, when the prosecutor was faced with a situation that indicated the existence of illegally obtained evidence, the prosecutor chose to continue the prosecution as long as it had met at least two valid pieces of evidence in accordance with Article 183 of the Criminal Code and the evidence supported the proof of elements of a criminal act. In addition, the main obstacles faced by prosecutors include a lack of coordination between investigators and prosecutors, low professionalism in assessing the legality of evidence, limited supporting facilities and facilities, and limited prosecutorial authority in testing the investigation process because testing the validity of evidence is entirely carried out by judges at trial. As for the suggestions given by the Prosecutor to improve work professionalism, rules are needed regarding coordination guidelines between investigators.

Keywords: Principle of Presumption of Innocence, Prosecution, Proof System, Invalid Evidence

This minor thesis has defended in front of the examiner team at, January 29th, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
Name	Dr. Yusefwan, S.H., M.H., L.L.M.	Efren Nova, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H

Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: